

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu kualitas manusia seutuhnya, olah otak, hati, rasa, raga dan memiliki daya saing tantangan global, peningkatan relevansi pendidikan, meningkatkan efisiensi manajemen. Kelulusan yang melek teknologi, memiliki keterampilan dan kecakapan hidup, sehingga dapat bersaing di dunia kerja merupakan target yang tidak dapat ditunda.

Di Era globalisasi sangat menuntut adanya perubahan untuk menyesuaikan diri dalam persaingan global pada semua bidang kehidupan khususnya bidang pendidikan. Berbicara masalah pendidikan memang tak ada habis-habisnya, selama kehidupan ini terus berlangsung dan dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan cermin kemajuan dari suatu bangsa. Bila tingkat pendidikan suatu pendidikan di suatu negara tinggi dan berkualitas baik, maka untuk memperoleh kemajuan didalam Negara tersebut tidak terlalu sulit. Oleh karena itu setiap negara didunia ini berusaha memajukan bangsanya melalui sektor pendidikan.

Ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu pendidikan antar daerah. Di Indonesia, ujian nasional dilakukan oleh pusat penelitian pendidikan, Depdiknas, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang itu menyatakan, bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional

perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ujian nasional dinilai masyarakat memberikan manfaat karena adanya kelulusan setiap mata pelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum. Selain itu, ujian nasional memberikan standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ujian nasional di Indonesia mendatangkan pro dan kontra. Dalam ujian nasional di Indonesia, penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tentu tidak sama.

Jenjang pendidikan tertentu, belum tentu setiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain, menentukan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Keadaan itu menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.

Daerah atau tempat siswa bersekolah juga menjadi masalah ketika harus berhadapan dengan ujian nasional yang seragam. Para siswa yang belajar yang disekolah-sekolah modern dengan guru dan fasilitas yang jauh lebih lengkap tentu memiliki kemungkinan yang lebih baik dalam menghadapi ujian nasional, jika

dibandingkan dengan siswa yang belajar disekolah pedesaan yang guru dan fasilitas pendidikannya serba kurang.

Kenyataan semacam inilah yang menjadikan banyak pihak tidak menyetujui keberadaan ujian nasional, meski ujian nasional juga membawa dampak positif dalam segi tertentu. Pihak yang setuju bahwa ujian nasional harus di hapuskan menyakini ujian nasional bukan satu-satunya alat untuk mempertimbangkan kelulusan siswa. Sistem pendidikan yang bagus dan di support dengan sumber daya manusia guru yang berkualitas serta fasilitas, penunjang pendidikan yang baik, dan berkualitas serta merata di berbagai daerah di Indonesia, maka bisa di pastikan pendidikan di Indonesia akan bisa maju seperti negara lain.

Terlepas dari hal tersebut, berikut ini lima Negara maju yang tidak menyelenggarakan ujian nasional bagi para siswa sekolahnya. Sistem, pendidikan dari lima Negara maju ini bisa menjadi cermin yang cukup baik untuk berkaca, demi menata kembali sistem pendidikan di Indonesia.

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat tidak menggunakan ujian nasional karena di negara tersebut lebih memprioritaskan sistem pendidikan yang meningkatkan sumber daya manusia para siswa di sana. Pihak pemerintah akan memberikan kebebasan pihak sekolah untuk menentukan masalah kelulusan kepada para siswa mereka sendiri. Sehingga siswa-siswi di sana termasuk memiliki di atas rata-rata dari negara lain.

b. Finlandia

Negara Finlandia merupakan negara yang sudah diakui semua negara dengan sistem pendidikannya yang terbaik di dunia. Sistem pendidikan yang mengarah pada evaluasi. Yaitu sistem dengan fokus melatih dan mendidik kepada para guru supaya bisa melakukan tugas evaluasi yang berkualitas dan terbaik untuk para muridnya.

c. Jerman

Jerman tidak menerapkan ujian nasional karena sistem pendidikan di sana mengedepankan kualitas guru dan pengajar disana. Selain itu, fasilitas pendidikan di Jerman juga sangat baik. Perpustakaan di Jerman dibangun tidak hanya di sekolah-sekolah saja tapi juga di daerah-daerah sekalipun juga disediakan fasilitas perpustakaan dengan fasilitas modern, megah, dan nyaman sehingga masyarakat disana bisa mendapatkan pendidikan kapanpun mereka mau dengan datang ke perpustakaan. Selain menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang terbaik, pemerintah Jerman juga menyediakan adanya media pembelajaran yang kaya, sehingga memungkinkan terhadap peserta didik bisa secara terus-menerus untuk belajar dengan membaca buku wajib, buku rujukan, juga buku bacaan, juga kelengkapan pada masalah laboratorium. Dengan cara ini para siswa di Jerman merasa bahagia dan menikmati dalam setiap proses pendidikan disana.

d. Australia

Negara ini menggunakan sistem pendidikan yang dikenal dengan istilah sistem ujian state. Sistem pendidikan dengan menggunakan sistem ujian state yaitu ujian yang dalam pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk menentukan terhadap

lulus tidaknya bagi para peserta didik, melainkan hanya untuk menentukan mau melanjutkan kemana siswa tersebut dalam hal bidang yang mereka sukai dan mereka juga memiliki bakat didalamnya. Jadi dengan adanya sistem ini, walaupun dalam proses ujian state ini seorang siswa memiliki hasil nilai yang buruk sekalipun, para siswa tersebut tetap akan lulus dan bisa lanjut ke Universitas yang diinginkannya.

e. Kanada

Kualitas pendidikan di Kanada sangat diperhatikan yaitu dengan cara selalu terus menerus melakukan kontrol dan melakukan evaluasi dan perbaikan atas setiap kemajuan terkait kualitas pada diri siswa. Untuk mencapai sistem pendidikan yang terbaik, pihak pemerintah Kanada akan memberikan jaminan mutu pendidikan yang terkontrol dengan ketat. Semua lembaga penjamin mutu di negara ini akan benar-benar bekerja dengan ketat dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dengan adanya kontrol yang ketat serta evaluasi yang terus menerus dan dengan penyediaan yang sangat baik, maka jangan heran jika para murid yang memang akan masuk ke perguruan tinggi hanya mengandalkan rapor terakhir dan tidak memerlukan ijazah sebagaimana di negara kita Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia, mau diadakan UN ataupun tidak, yang jauh lebih penting lagi diperbaiki adalah mental dan kualitas dari para pembuat sistem pendidikannya, kualitas sumber daya manusia para gurunya, fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, laboratorium yang harus merata di seluruh daerah di Indonesia, dan hal yang jauh lebih penting lagi yaitu mental korup yang masih saja

mengerogoti proyek demi proyek yang ada di anggaran pendidikan yang harus di hentikan. Dengan cara itu, mau diadakan ujian nasional atau tidak, pendidikan di Indonesia akan bisa maju.

Tabel I.1
Nilai Rata-rata UN SMA Negeri jurusan IPA dan IPS di Indonesia

IPA	2011	2012	2013	2014	IPS	2011	2012	2013	2014
B.Indonesia	7.91	7.72	7.08	7.24	B.Indonesia	7.35	7.15	6.36	6.49
B.inggris	8.16	7.48	7.2	6.54	B.Ingggris	7.68	6.97	6.64	5.87
Matematika	8.14	8.52	6.04	6.07	Matematika	7.64	7.86	5.86	5.4
Fisika	8.17	7.6	6.11	6.47	Ekonomi	7.57	7.12	5.62	5.68
Kimia	8.41	8.55	6.84	6.03	Sosiologi	7.14	7.5	6.2	6.05
Biologi	7.89	8.07	6.67	6.21	Geografi	7.25	7.58	5.71	5.69

Sumber: Kemendikbud di olah Tahun 2015

Tabel I.1 di atas memperlihatkan hasil UN siswa SMA di Indonesia pada jurusan ipa setiap tahunnya mengalami penurunan dan hanya ada beberapa mata pelajaran yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kelulusan siswa di Indonesia masih sangat rendah. Dari keseluruhan kelulusan ini mengalami penurunan sehingga ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya hasil belajar siswa di Indonesia. Dan tidak jauh berbeda hasil UN siswa SMA di Indonesia pada jurusan ips setiap tahunnya tidak jauh beda dengan jurusan ipa dan hanya ada beberapa mata pelajaran yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tingkat kelulusan siswa di Indonesia masih sangat rendah. Dari keseluruhan kelulusan ini mengalami penurunan sehingga ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya hasil ujian siswa di Indonesia.

Berdasarkan diatas bahwa hasil ujian nasional siswa masih sangat rendah yang membuat ujian nasional menjadi masalah dan perlu di kaji ulang perlu adanya ujian nasional tersebut.

Faktor yang mempengaruhi ujian nasional menjadi berhasil yaitu, kualitas sistem pendidikannya, kualitas kompetensi gurunya, fasilitas pendidikannya, biaya pendidikannya, dan minat belajar siswa.

Kualitas siswa yang berhasil tidak lepas dari peran kompetensi guru yang dapat menunjang keberhasilan pada ujian nasional. Apabila kompetensi guru bagus akan mempengaruhi cara mengajar di kelas sehingga siswa akan nyaman dengan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas. Kompetensi guru dapat dilihat dari uji kompetensi guru tersebut, bila guru dalam kompetensinya melebihi rata-rata dari standar kompetensi guru maka guru tersebut akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya hasil ujian nasional.

Tabel I.2
Rata-rata Uji Kompetensi Guru Tahun 2012-2013

No	Provinsi	Uji Kompetensi Guru	
		2012	2013
1	Provinsi Aceh	43.72	40.91
2	Provinsi Sumatera Utara	48.76	43.57
3	Provinsi Sumatera Barat	53.24	49.7
4	Provinsi Kepulauan Riau	50.82	44.76
5	Provinsi Sumatera Selatan	44.86	44.27
6	Provinsi Bangka Belitung	48.28	42.16
7	Provinsi Bengkulu	50.64	48.1
8	Provinsi Lampung	48.96	45.3
9	Provinsi Jawa Barat	49.64	45.18
10	Provinsi Jawa Timur	56.22	53.42
11	Provinsi Kalimantan Barat	55.35	51.74
12	Provinsi Kalimantan Tengah	52.59	47.14
13	Provinsi Kalimantan Selatan	56.9	55.13
14	Provinsi Kalimantan Timur	55.43	54.13
15	Provinsi Sulawesi Utara	54.36	52.74
16	Provinsi Gorontalo	51.55	45.25
17	Provinsi Sulawesi Tengah	48.47	44
18	Provinsi Sulawesi Selatan	50.18	48.57
19	Provinsi Sulawesi Barat	50.91	47.01
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	46.06	42.15
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	49.43	42.05
22	Provinsi Nusa Tenggara Timur	46.01	40.1
23	Provinsi Maluku	48	44.83
24	Provinsi Maluku Utara	45.09	41.24
25	Provinsi Papua	47.46	40.01
26	Provinsi Papua Barat	59.03	52.68
27	Provinsi Riau	50.43	45.93
28	Provinsi Jambi	48.04	41.6
29	Provinsi DKI Jakarta	43.79	37.97
30	Provinsi Banten	40.31	36.19
31	Provinsi Jawa Tengah	47.88	42.44
32	Provinsi DI Yogyakarta	44.57	40.66
33	Provinsi Bali	46.65	39.98

Sumber: Kemendibud di olah Tahun 2015

Tabel I.2 Uji kompetensi guru mengalami penurunan di berbagai provinsi sehingga kualitas guru tersebut dapat membuat kualitas pendidikan yang akan menurun setiap tahunnya. Karena faktor kompetensi guru berpengaruh terhadap proses belajar yang dilakukan siswa dan hasil ujian nasionalnya.

Faktor yang lain mempengaruhi ujian nasional yaitu biaya pendidikan karena diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah (*intra dana ekstra*), dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan biaya pendidikan. Sejalan dengan ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada biaya pendidikan tersebut di alokasikan dana BOS untuk meringankan beban operasional sekolah.

Tabel I.3
Bantuan Operasional Sekolah di Indonesia

No	Provinsi	Bantuan Operasional Sekolah	
		2012	2013
1	Provinsi Aceh	42,732,930,000	455,116,370,000
2	Provinsi Sumatera Utara	22,291,330,000	1,587,164,900,000
3	Provinsi Sumatera Barat	15,884,230,000	560,500,320,000
4	Provinsi Kepulauan Riau	1,366,040,000	167,873,850,000
5	Provinsi Sumatera Selatan	50,353,060,000	812,555,450,000
6	Provinsi Bangka Belitung	594,270,000	131,190,220,000
7	Provinsi Bengkulu	24,661,320,000	200,422,450,000
8	Provinsi Lampung	40,520,050,000	774,390,080,000
9	Provinsi Jawa Barat	135,776,230,000	4,161,094,410,000
10	Provinsi Jawa Timur	29,918,480,000	2,777,420,060,000
11	Provinsi Kalimantan Barat	122,704,780,000	534,270,810,000
12	Provinsi Kalimantan Tengah	9,521,100,000	245,407,820,000
13	Provinsi Kalimantan Selatan	5,911,260,000	322,856,840,000
14	Provinsi Kalimantan Timur	10,375,870,000	408,618,280,000
15	Provinsi Sulawesi Utara	9,900,050,000	255,793,430,000
16	Provinsi Gorontalo	11,766,020,000	120,657,990,000
17	Provinsi Sulawesi Tengah	59,253,570,000	317,324,160,000
18	Provinsi Sulawesi Selatan	38,603,940,000	918,425,540,000
19	Provinsi Sulawesi Barat	38,065,400,000	152,367,660,000
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	19,290,680,000	301,429,500,000
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	52,906,220,000	455,564,800,000
22	Provinsi Nusa Tenggara Timur	154,782,260,000	717,287,620,000
23	Provinsi Maluku	69,944,320,000	218,360,410,000
24	Provinsi Maluku Utara	25,171,830,000	153,315,130,000
25	Provinsi Papua	119,504,960,000	336,580,280,000
26	Provinsi Papua Barat	34,119,100,000	119,650,480,000
27	Provinsi Riau	35,000,800,000	640,000,000,000
28	Provinsi Jambi	28,180,000,000	338,000,000,500
29	Provinsi DKI Jakarta	45,000,000,000	798,000,000,000
30	Provinsi Banten	25,000,000,000	800,000,000,000
31	Provinsi Jawa Tengah	25,000,000,000	350,000,000,000
32	Provinsi DI Yogyakarta	34,000,000,000	560,000,000,000
33	Provinsi Bali	37,000,000,000	391,380,560,000

Sumber: Kemenkeu data di olah tahun 2015

Tabel I.3 bantuan operasional sekolah yang di berikan pemerintah pusat untuk provinsi di Indonesia untuk menunjang proses belajar mengajar siswa di sekolah dan anggarannya setiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga dapat membiayai pendidikan di Indonesia. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Setiap siswa di SMA Negeri di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Memiliki kompetensi guru yang bervariasi serta biaya pendidikan yang minim jauh dari layak. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Pengaruh Uji Kompetensi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Hasil Ujian Nasional SMA Negeri di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas terlihat berbagai masalah yang terjadi disekolah khususnya masalah hasil belajar dalam menjalankan tugasnya diantaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas sistem pendidikan terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh uji kompetensi guru terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia ?
3. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia?

4. Apakah terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh bantuan operasional sekolah terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Faktor yang mempengaruhi hasil ujian nasional cukup banyak dan kompleks. Namun dikarenakan keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya dan tenaga, serta agar penelitian lebih terarah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah.

1. Apakah terdapat pengaruh uji kompetensi guru terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh bantuan operasional sekolah terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia?

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan di kaji melalui penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh uji kompetensi guru terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh bantuan operasional sekolah terhadap hasil ujian nasional SMA Negeri di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam menggali hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil ujian nasional, khususnya mengenai uji kompetensi guru dan bantuan operasional sekolah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengembangan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Bagi para siswa hasil penelitian ini sebagai bahan masukkan dalam rangka mewujudkan hasil ujian nasional para siswa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga mampu meningkatkan kualitas yang bagus di sekolah. Bagi para pimpinan pendidikan, hasil penelitian ini sebagai masukan dalam rangka memotivasi para siswa dan pengembangan para siswa untuk meningkatkan kinerja sehingga mutu dan tujuan sekolah yang diharapkan dapat terwujud, dan bagi para pembaca, dapat menambah pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbang saran pada para siswa dalam rangka ikut mendukung usaha peningkatan mutu dan tujuan sekolah.